



Eco-Theology Implementation Policy Strategy at the Toraja State Christian Institute (IAKN)

Strategi Kebijakan Implementasi Eko-Teologi di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja

Yulianti Duma

Toraja State Christian Institute

Author Correspondence Email: yuliantiduma2011@gmail.com

Article History	Received (August 15 th , 2025)	Revised (September 21 st , 2025)	Accepted (November 27 th , 2025)
-----------------	--	--	--

Article News

Keyword:

Activist;
Eco-Theology;
Holistic;
Institutional;
Conservation;
Environmental;
Participatory;
Tri Dharma.

Abstract

This policy examines the fundamental problems in the implementation of eco-theology at the State Christian Institute (IAKN) Toraja, namely the absence of a formal policy framework at the institutional level and the absence of integrated implementation guidelines. This condition causes efforts related to eco-theology to be partial, unstructured, and unmeasurable, thus limiting the institution's contribution to environmental conservation issues. Based on a policy analysis using William N. Dunn's scoring theory, it was found that "Issuing a Rector's Regulation on the Integration of Eco-Theology in the Tri Dharma" is the most strategic and effective policy alternative. This policy is considered highly effective because it directly addresses the root of the problem by providing an official mandate and a binding legal basis for all work units, transforming eco-theology into an institutional priority, rather than merely an individual initiative. Therefore, it is recommended that IAKN Toraja prioritize the issuance of this rector's regulation as the main foundation. This policy will serve as a strong umbrella for subsequent steps, such as the development of integrated implementation guidelines and the development of a monitoring and evaluation system based on Key Performance Indicators (KPIs). With this approach, IAKN Toraja can ensure that the implementation of eco-theology is systematic, measurable, and accountable, so that it is able to fulfill its theological and social responsibilities in preserving the environment.

Kata Kunci:

Aktivis;
Eko-Teologi;
Holistik;
Institusional;
Konservasi;
Lingkungan;
Partisipatif;
Tri Dharma.

Abstrak

Kebijakan ini mengkaji permasalahan mendasar dalam implementasi eko-teologi di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, yaitu ketidadaan kerangka kebijakan formal di tingkat institusi dan belum adanya pedoman implementasi yang terpadu. Kondisi ini menyebabkan upaya terkait eko-teologi menjadi parsial, tidak terstruktur, dan tidak terukur, sehingga membatasi kontribusi institusi terhadap isu konservasi lingkungan. Berdasarkan analisis kebijakan menggunakan teori skoring William N. Dunn, ditemukan bahwa "Penerbitan Peraturan Rektor tentang Integrasi Eko-Teologi dalam Tri Dharma" merupakan alternatif kebijakan yang paling strategis dan efektif. Kebijakan ini dinilai sangat efektif karena secara langsung mengatasi akar masalah dengan memberikan mandat resmi dan landasan hukum yang mengikat bagi seluruh unit kerja, mengubah eko-teologi menjadi prioritas institusional,

buukan sekadar inisiatif individual. Oleh karena itu, direkomendasikan agar IAKN Toraja memprioritaskan penerbitan peraturan rektor ini sebagai fondasi utama. Kebijakan ini akan menjadi payung yang kuat untuk langkah-langkah selanjutnya, seperti penyusunan pedoman implementasi terpadu serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis Indikator Kinerja Utama (KPI). Dengan pendekatan ini, IAKN Toraja dapat memastikan bahwa implementasi eko-teologi berjalan sistematis, terukur, dan akuntabel, sehingga mampu memenuhi tanggung jawab teologis dan sosialnya dalam melestarikan lingkungan.

To cite this article: Yulianti Duma. (2025). Eco-Theology Implementation Policy Strategy at the Toraja State Christian Institute (IAKN). *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), Pages: 1565-1582.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Krisis lingkungan global saat ini telah menjadi salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi umat manusia, menuntut respons dari semua sektor kehidupan, termasuk institusi keagamaan dan pendidikan tinggi (Sachs, 2015). Isu-isu seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan ekosistem bukan lagi sekadar masalah ilmiah, melainkan telah bergeser menjadi persoalan etika, moral, dan spiritual. Dalam konteks ini, teologi memiliki peran krusial untuk memberikan kerangka pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara manusia, ciptaan, dan Sang Pencipta, serta menginspirasi tindakan nyata untuk melindungi bumi.

Sebagai respons terhadap krisis ekologi, eko-teologi telah muncul sebagai cabang ilmu teologi yang berkembang pesat. Eko-teologi menafsirkan kembali doktrin-doktrin iman Kristen, seperti doktrin penciptaan, keselamatan, dan eskatologi, dengan lensa kepedulian terhadap lingkungan. Konsep pemeliharaan ciptaan (stewardship) yang berakar dari Kitab Kejadian kini tidak lagi dipahami sebagai dominasi manusia atas alam, melainkan sebagai tanggung jawab etis dan teologis untuk merawat dan melestarikan bumi (Berry, 1999). Pandangan ini mendorong gereja dan lembaga teologi untuk tidak hanya berkhotbah, tetapi juga bertindak dalam upaya konservasi dan advokasi lingkungan.

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, sebagai lembaga pendidikan tinggi teologi di wilayah yang kaya akan warisan budaya dan keanekaragaman hayati, memiliki posisi unik dan strategis dalam merespons tantangan ini. Visi institusi untuk mencetak pemimpin Kristen yang relevan secara kontekstual secara inheren menyertakan tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan ekologis di Toraja. Masyarakat Toraja sendiri memiliki kearifan lokal yang kuat terkait alam dan lingkungan, yang secara teologis dapat diperkuat melalui pendekatan eko-teologi (Tangdilintin, 2017).

Namun, meskipun memiliki potensi dan posisi yang strategis, implementasi eko-teologi di IAKN Toraja masih belum berjalan efektif. Berbagai inisiatif yang ada cenderung sporadis dan kurang terkoordinasi, tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam keseluruhan sistem pendidikan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini mengakibatkan eko-teologi masih berada di pinggiran, bukan sebagai bagian integral dari identitas dan misi institusi, sehingga kontribusi nyata IAKN Toraja terhadap isu lingkungan masih terbatas.

Salah satu akar permasalahan utama dari kondisi ini adalah ketiadaan kerangka kebijakan formal di tingkat institusi. Tanpa adanya peraturan rektor atau surat keputusan yang secara eksplisit mewajibkan dan memberikan mandat resmi untuk eko-teologi, upaya yang ada tidak memiliki payung hukum dan legitimasi yang kuat (Dye, 2013). Akibatnya, eko-teologi cenderung bergantung pada inisiatif personal dosen atau unit tertentu, bukan sebagai kewajiban institusional yang terstruktur. Ini mencerminkan kelemahan dalam tahap perumusan kebijakan, yang menurut teori, sangat krusial bagi keberhasilan implementasi.

Ketiadaan kebijakan formal ini diperparah dengan belum adanya pedoman implementasi yang terpadu. Menurut teori implementasi kebijakan, keberhasilan program sangat bergantung pada kejelasan komunikasi dan pedoman (Edwards III, 1980). Tanpa pedoman terpadu yang memberikan arahan teknis tentang bagaimana eko-teologi harus diwujudkan dalam kurikulum, riset, dan pengabdian, setiap unit atau individu memiliki interpretasi yang berbeda. Hal ini menciptakan duplikasi upaya, inkonsistensi, dan ketidakseragaman dalam implementasi, yang membuat eko-teologi tidak terstruktur dan sulit untuk disebarluaskan secara sistematis.

Konsekuensi langsung dari ketiadaan kerangka kebijakan dan pedoman ini adalah ketidakterukuran kontribusi. Tanpa adanya kebijakan formal yang menetapkan tujuan dan indikator kinerja, IAKN Toraja tidak memiliki alat untuk mengukur dampak dari upaya eko-teologi yang telah dilakukan (Neely, 2002). Akibatnya, institusi sulit untuk menilai keberhasilan, mengidentifikasi area perbaikan, dan mempertanggungjawabkan perannya kepada para pemangku kepentingan. Hal ini tidak hanya menghambat perbaikan berkelanjutan, tetapi juga membatasi kemampuan IAKN Toraja untuk menunjukkan bukti kontribusi nyata terhadap isu konservasi lingkungan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk merumuskan strategi kebijakan implementasi eko-teologi yang komprehensif dan terstruktur di IAKN Toraja. Artikel ini tidak hanya berfokus pada pentingnya eko-teologi secara teoritis, tetapi juga berupaya memberikan solusi praktis dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan. Perumusan strategi ini sangat penting untuk memastikan bahwa visi dan misi IAKN Toraja selaras dengan tindakan nyata di lapangan, menjadikannya institusi yang relevan dan responsif.

Strategi kebijakan yang diusulkan akan mencakup serangkaian langkah terpadu, dimulai dari pembentukan kebijakan fondasional hingga pengembangan sistem operasional. Langkah-langkah ini akan mencakup penerbitan peraturan rektor, penyusunan pedoman implementasi terpadu, peningkatan kapasitas dosen, hingga pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis Indikator Kinerja Utama (KPI). Pendekatan ini diharapkan mampu mengatasi akar masalah secara sistematis dan menyeluruh.

Oleh karena itu, kajian ini memiliki signifikansi besar bagi IAKN Toraja, pemerintah, gereja, dan masyarakat. Dengan adanya strategi kebijakan yang jelas, IAKN Toraja dapat secara efektif mentransformasi dirinya menjadi pemimpin dalam pendidikan teologi yang berbasis ekologis, memberikan kontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan di Toraja, dan memperkuat perannya sebagai agen perubahan yang relevan dengan tantangan zaman (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Secara teologis, seruan untuk mengimplementasikan eko-teologi ini memiliki landasan yang kuat. Kitab Kejadian 2:15, yang memerintahkan manusia untuk "mengusahakan dan memelihara" taman Eden, tidak hanya berfungsi sebagai izin, tetapi juga sebagai tanggung jawab ilahi untuk menjadi pelayan setia (*steward*) bagi ciptaan Tuhan.

Hermeneutika ekologis modern menegaskan bahwa mandat ini bersifat kekal, menuntut umat beriman untuk bertindak sebagai agen penyembuhan bagi bumi yang rusak (Habel, 2000). Oleh karena itu, bagi IAKN Toraja, merumuskan kebijakan eko-teologi bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah respons teologis yang otentik dan mendalam terhadap konteks krisis ekologi saat ini.

Di samping itu, resistensi internal juga menjadi tantangan. Sebagian civitas akademika mungkin masih beranggapan bahwa isu lingkungan adalah domain ilmu-ilmu alam dan sains, bukan teologi (Sembel, 2023; Salmon Pamantung dan Yohanes Krismatyo Susanta, 2022). Paradigma lama yang memisahkan antara ranah spiritual dan material masih mengakar kuat, sehingga eko-teologi dipandang sebagai “pelengkap” atau bahkan isu yang kurang relevan dengan misi utama lembaga keagamaan. Pergeseran paradigma ini memerlukan kepemimpinan yang kuat dan kebijakan yang visioner untuk mengubah cara pandang institusi secara menyeluruh.

Sebagai institusi pendidikan tinggi, IAKN Toraja memiliki tanggung jawab yang melampaui Tri Dharma tradisional. Konsep misi ketiga universitas menekankan peran institusi dalam berkontribusi pada pengembangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat (Etzkowitz, 2003). Dalam konteks Toraja, misi ketiga ini secara langsung menuntut IAKN Toraja untuk mengambil peran aktif dalam advokasi dan edukasi lingkungan, yang secara efektif dapat diwujudkan melalui kebijakan eko-teologi. Kebijakan ini akan menjadi jembatan antara pengetahuan teoretis di kampus dan kebutuhan nyata di komunitas, menegaskan posisi IAKN Toraja sebagai agen perubahan yang relevan.

Meski demikian, tantangan internal utama yang dihadapi adalah kurangnya kapasitas dan pemahaman dosen terkait eko-teologi. Bahkan jika ada kebijakan yang mewajibkan, implementasi akan gagal jika para dosen sebagai pelaksana utama tidak memiliki kompetensi dan keyakinan yang memadai. Menurut teori perubahan organisasi, keberhasilan inovasi di lembaga pendidikan sangat bergantung pada pengembangan profesional berkelanjutan dan dukungan terhadap para staf pengajar (Fullan, 2007). Oleh karena itu, strategi kebijakan yang efektif harus secara eksplisit memasukkan program peningkatan kapasitas dosen agar mereka mampu mengintegrasikan eko-teologi secara holistik dan efektif.

Peran mahasiswa juga menjadi elemen vital dalam keberhasilan implementasi. Sebuah kebijakan yang kuat akan tidak hanya mendidik, tetapi juga memberdayakan mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang beretika lingkungan di komunitas dan gereja mereka. Keterlibatan mahasiswa dalam proyek-proyek lingkungan yang diamanatkan oleh kebijakan institusional dapat menumbuhkan kesadaran ekologis yang mendalam dan mengubah pengetahuan teoretis menjadi tindakan nyata (Sterling, 2001). Dengan demikian, mahasiswa akan lulus sebagai agen perubahan yang memiliki visi teologis dan komitmen praktis terhadap kelestarian lingkungan, yang merupakan tujuan utama pendidikan eko-teologi.

Secara spesifik, kebijakan ini sangat relevan dengan konteks lokal di Toraja. Wilayah ini menghadapi tantangan lingkungan seperti deforestasi akibat alih fungsi lahan, masalah pengelolaan sampah, dan eksploitasi sumber daya alam (Rasyid, 2018). Sebuah strategi kebijakan yang komprehensif dapat mengarahkan penelitian mahasiswa dan dosen untuk menemukan solusi teologis dan praktis bagi masalah-masalah ini. Selain itu, kebijakan ini dapat memfasilitasi pengabdian masyarakat yang berfokus pada penguatan kearifan lokal terkait lingkungan, seperti tradisi konservasi alam, yang secara teologis dapat diperkuat melalui eko-teologi.

Menghadapi tantangan ini, mengandalkan inisiatif ad-hoc atau upaya personal tidak lagi memadai. Praktik yang tidak terkoordinasi dan tidak berkelanjutan tidak akan menciptakan dampak yang signifikan atau langgeng (Senge, 2006). Oleh karena itu, pendekatan strategis melalui kebijakan formal sangat dibutuhkan. Kebijakan ini akan memastikan bahwa setiap upaya eko-teologi, baik dalam skala kecil maupun besar, terintegrasi ke dalam visi besar institusi, memiliki dukungan yang berkelanjutan, dan berkontribusi pada tujuan yang sama.

Penyusunan strategi kebijakan ini juga merupakan sebuah proses yang memerlukan pemahaman mendalam tentang teori implementasi. Model proses kebijakan menekankan pentingnya siklus yang berkelanjutan, mulai dari penetapan agenda hingga evaluasi (Sabatier & Weible, 2007). Strategi yang diusulkan akan mengikuti siklus ini, memastikan bahwa penerbitan peraturan rektor hanyalah langkah awal, yang kemudian diikuti dengan pengembangan pedoman teknis, program pelatihan, dan sistem evaluasi. Pendekatan bertahap ini akan lebih efektif dan realistik untuk diterapkan di IAKN Toraja.

Salah satu komponen kunci dari strategi ini adalah mekanisme monitoring dan evaluasi (M&E) yang kuat. Tanpa sistem M&E, sulit untuk mengukur dampak dan efektivitas dari kebijakan dan program yang diimplementasikan (Rossi, Lipsey, & Henry, 2019). Strategi ini akan mengamanatkan pengembangan Indikator Kinerja Utama (KPI) yang relevan, yang tidak hanya mengukur kuantitas (misalnya, jumlah acara atau publikasi), tetapi juga kualitas dan dampak nyata (misalnya, perubahan perilaku mahasiswa, kontribusi terhadap konservasi). Sistem ini akan memungkinkan IAKN Toraja untuk secara akuntabel menunjukkan kontribusinya kepada publik.

Pada akhirnya, strategi kebijakan implementasi eko-teologi ini bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang holistik. Kurikulum yang mengintegrasikan eko-teologi akan membentuk mahasiswa menjadi individu yang utuh, yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual dan etika lingkungan yang kuat (Miller, 2007). Penelitian yang responsif dan pengabdian masyarakat yang berorientasi lingkungan akan memastikan bahwa IAKN Toraja bukan hanya menjadi tempat transmisi ilmu, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan solusi bagi tantangan ekologis di Toraja.

Dengan demikian, perumusan dan pengesahan strategi kebijakan implementasi eko-teologi ini adalah langkah strategis yang sangat diperlukan. Ia akan mengatasi kelemahan mendasar dalam tata kelola institusi, memberikan arah yang jelas bagi seluruh sivitas akademika, dan memastikan bahwa IAKN Toraja dapat memenuhi tanggung jawab teologis dan sosialnya untuk menjadi institusi yang relevan, inovatif, dan berdaya guna dalam menghadapi krisis lingkungan.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasi masalah kesenjangan antara wacana idealis eko-teologi dan praktik institusional di IAKN Toraja menimbulkan serangkaian masalah yang saling berkaitan. Permasalahan utama yang menjadi fokus Analisis ini adalah ketiadaan kebijakan formal dari pimpinan institusi mengenai pengintegrasian eko-teologi ke dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan akar dari berbagai persoalan fundamental yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pimpinan Belum mewajibkan materi eko-teologi masuk dalam kurikulum

Masalah ini seringkali berakar dari kurangnya inisiatif dari pimpinan untuk menjadikan Eko-teologi sebagai agenda utama. Pimpinan mungkin belum melihat urgensi atau korelasi langsung antara isu kerusakan lingkungan dengan misi keagamaan institusi. Akibatnya, tidak ada dorongan yang cukup kuat untuk membuat kebijakan resmi.

2. Kurangnya Kapasitas dan Pemahaman Dosen tentang Eko-Teologi

Meskipun ada beberapa dosen yang mungkin peduli, pemahaman yang mendalam mengenai Eko-teologi sebagai disiplin ilmu yang terintegrasi dalam mata kuliah dan penelitian masih terbatas. Banyak dosen mungkin menganggap Eko-teologi sebagai topik tambahan semata, bukan sebagai kerangka berpikir yang harus diterapkan dalam setiap aspek Tri Dharma. Hal ini menyebabkan resistensi atau kesulitan dalam mengintegrasikan konsep ini ke dalam kurikulum atau proyek pengabdian.

3. Eko-Teologi Belum terimplementasi dalam Tri Dharma di IAKN Toraja

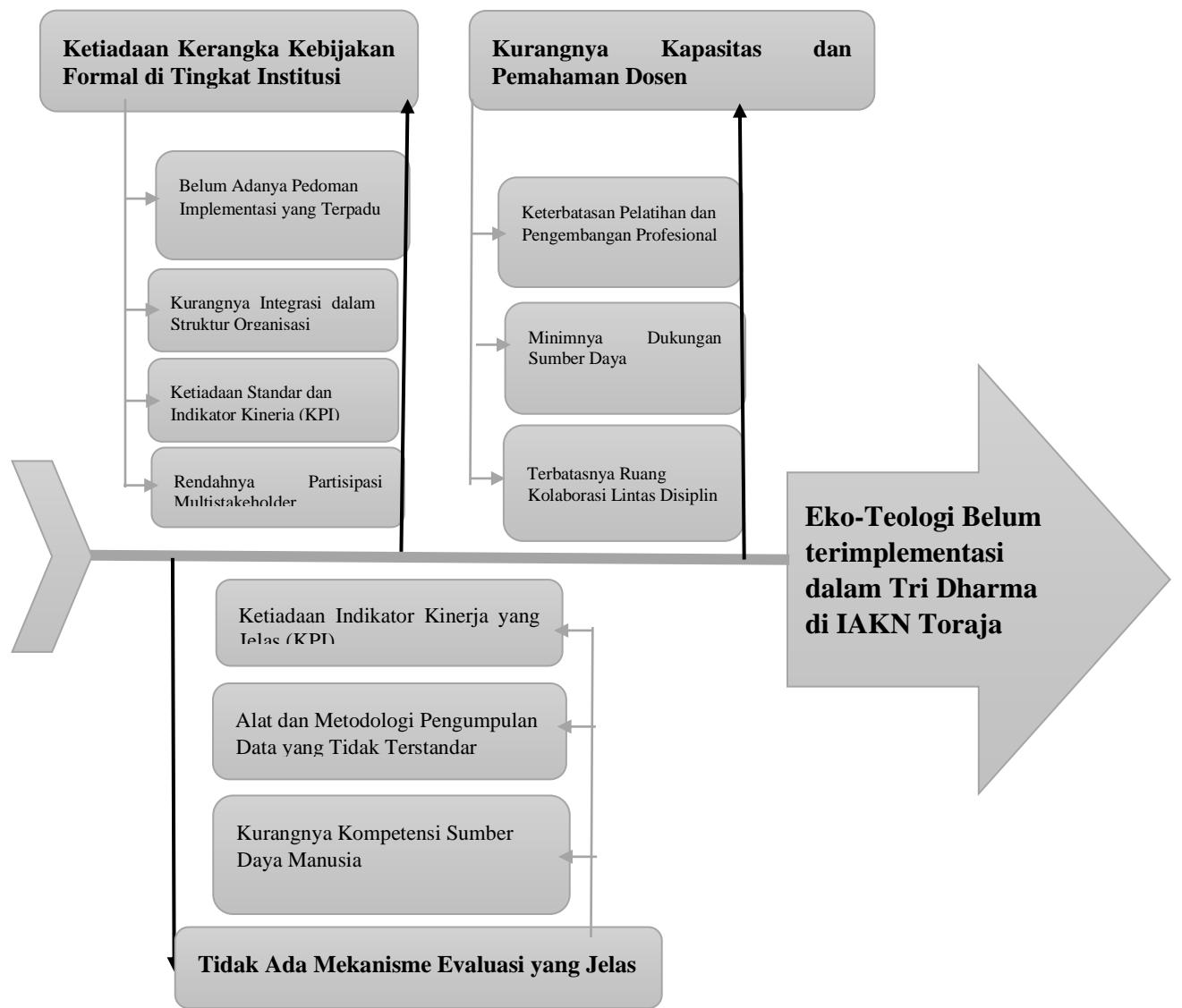
IAKN Toraja belum secara penuh memanfaatkan potensi akademiknya untuk menjadi agen perubahan yang proaktif dan berdampak dalam menjawab krisis lingkungan dari perspektif teologis dan iman Kristen.

Kemudian akar masalah di atas dianalisis menggunakan teori: USG, yaitu: *Urgency* (urgensi), *Seriousness* (kesungguhan), dan *Growth* (pertumbuhan). Berdasarkan hasil analisis *Urgency*, *Seriousness*, *Growth* (USG) ketiga permasalahan di atas, dengan rentang 1 – 5, di mana 5 adalah yang tertinggi (paling mendesak/serius/berkembang) dan 1 adalah yang terendah, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Permasalahan Utama	Urgency	Seriousness	Growth	Total Skor
1	Pimpinan Belum mewajibkan materi eko-teologi masuk dalam kurikulum Tanpa inisiatif dari pimpinan, tidak ada kebijakan yang akan dibuat, tidak ada anggaran yang dialokasikan, dan tidak ada dorongan bagi dosen untuk berpartisipasi. Dampaknya sangat serius karena menghambat seluruh proses integrasi Eko-teologi dan masalah akan terus memburuk seiring waktu jika tidak ada perubahan.	4	5	4	13
2	Kurangnya Kapasitas dan Pemahaman Dosen Meskipun ada inisiatif dari pimpinan, tanpa pemahaman dan kapasitas yang memadai dari dosen, kebijakan yang ada tidak akan bisa diimplementasikan dengan baik di lapangan. Masalah ini akan memburuk seiring dengan perkembangan isu lingkungan yang semakin kompleks, sementara dosen tidak memiliki bekal yang cukup.	4	5	4	13
3	Eko-Teologi Belum terimplementasi dalam Tri Dharma di IAKN Toraja IAKN Toraja belum secara penuh memanfaatkan potensi akademiknya untuk menjadi agen perubahan yang proaktif dan berdampak dalam menjawab krisis lingkungan dari perspektif teologis dan iman Kristen.	5	5	4	14

Berdasarkan hasil analisis menggunakan USG di atas, maka masalah utama yaitu “Eko-Teologi Belum terimplementasi dalam Tri Dharma di IAKN Toraja” menjadi prioritas utama yang harus segera ditindaklanjuti, dengan total skor: 14, Karena implementasi eko-teologi dalam tri dharma menjadi dasar bagi program dan kegiatan di IAKN Toraja.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, analisis ini akan secara khusus menganalisis kebijakan yang dipilih adalah Penerbitan Peraturan Rektor tentang Integrasi Eko-Teologi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bagaimana dampaknya terhadap kontribusi nyata IAKN Toraja dalam upaya konservasi lingkungan.



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Diagram ini menunjukkan bahwa masalah Eko-Teologi Belum terimplementasi dalam Tri Dharma di IAKN Toraja bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi kompleks dari berbagai penyebab di level ketidadaan kerangka kebijakan di tingkat institusi, kurangnya kapasitas dan pemahaman dosen, dan tidak ada mekanisme evaluasi yang jelas. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan yang holistik dan sistematis untuk menemukan solusi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan tiga akar masalah yang telah diidentifikasi, dapat dirumuskan bahwa Di IAKN Toraja, ketiadaan kerangka kebijakan formal di tingkat institusi menyebabkan implementasi eko-teologi menjadi tidak efektif. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya pedoman implementasi yang terpadu, sehingga upaya terkait eko-teologi dalam Tri Dharma menjadi parsial, tidak terstruktur, dan tidak terukur, serta secara signifikan membatasi kontribusi nyata institusi terhadap isu konservasi lingkungan.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

Secara umum, kajian ini bertujuan untuk merumuskan strategi kebijakan yang komprehensif dan terukur guna mengatasi permasalahan implementasi eko-teologi di IAKN Toraja. Secara lebih rinci, tujuan dari kajian ini adalah:

1. Menganalisis Akar Permasalahan: Mengidentifikasi secara mendalam akar masalah yang menyebabkan implementasi eko-teologi menjadi tidak efektif, tidak terstruktur, dan tidak terukur, yaitu ketiadaan kebijakan formal dan pedoman terpadu.
2. Mengevaluasi Alternatif Kebijakan: Menganalisis dan memberikan penilaian terstruktur terhadap berbagai alternatif kebijakan (seperti Peraturan Rektor, Pedoman Terpadu, dll.) menggunakan teori skoring William N. Dunn.
3. Merumuskan Rekomendasi Strategis: Menyusun rekomendasi kebijakan yang paling efektif dan layak untuk menjadi acuan bagi IAKN Toraja dalam mengimplementasikan eko-teologi secara sistematis dan berkelanjutan.

Manfaat Kajian

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan:

1. Bagi IAKN Toraja: Menyediakan peta jalan (roadmap) kebijakan yang jelas dan terukur untuk mengintegrasikan eko-teologi dalam Tri Dharma, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas, relevansi, dan akuntabilitas institusi sebagai agen perubahan.
2. Bagi Pimpinan Institusi: Memberikan dasar pengambilan keputusan yang kuat dan rasional, didukung oleh analisis teoretis, untuk memprioritaskan kebijakan yang paling efektif dan efisien.
3. Bagi Dosen dan Mahasiswa: Menawarkan panduan yang terpadu dan terstruktur, yang mempermudah integrasi eko-teologi dalam kegiatan akademik dan non-akademik, serta memberdayakan mereka untuk berkontribusi secara nyata pada isu lingkungan.
4. Bagi Masyarakat dan Gereja: Memastikan bahwa IAKN Toraja menghasilkan lulusan yang peduli lingkungan dan program yang relevan, sehingga dapat menjadi mitra strategis yang aktif dalam upaya konservasi dan advokasi lingkungan di Toraja.

KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Publik (*Public Policy Theory*)

Menurut teori ini, pembentukan kebijakan merupakan proses yang kompleks, dipengaruhi oleh banyak faktor. Kebijakan tidak akan terbentuk jika tidak ada agenda *setting* yang kuat, yaitu proses di mana isu-isu tertentu mendapatkan perhatian dari pembuat keputusan. Ketiadaan kebijakan di IAKN Toraja menunjukkan bahwa isu Eko-teologi belum berhasil masuk ke dalam agenda kebijakan institusi.

2. Teori Perubahan Organisasi (*Organizational Change Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa perubahan di dalam sebuah organisasi, termasuk institusi pendidikan, seringkali menghadapi resistensi. Perubahan yang berhasil memerlukan dorongan kuat dari kepemimpinan transformasional yang mampu menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi. Ketiadaan komitmen pimpinan menunjukkan kurangnya kepemimpinan transformasional yang dapat mendorong perubahan ke arah integrasi Eko-teologi.

3. Teori Sumber Daya Manusia (*Human Resource Theory*)

Teori ini menekankan bahwa kinerja dan keberhasilan sebuah organisasi sangat bergantung pada kualitas dan keahlian sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam konteks ini, ketiadaan kapasitas dan keahlian dosen dalam bidang Eko-teologi menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan. Institusi perlu berinvestasi dalam pengembangan kapasitas (*capacity building*) untuk memastikan SDM memiliki kompetensi yang relevan.

4. Teori Komunitas Praktik (*Community of Practice Theory*)

Teori ini dikembangkan oleh Etienne Wenger, menyatakan bahwa pembelajaran dan pengembangan pengetahuan terjadi secara sosial melalui interaksi di antara individu yang memiliki minat atau pekerjaan yang sama. Ketiadaan wadah atau komunitas praktik yang membahas Eko-teologi di IAKN Toraja menghambat dosen, mahasiswa, dan staf untuk saling berbagi pengetahuan dan mengadvokasi isu ini, sehingga tidak terbentuk dorongan kolektif.

5. Teori Gerakan Sosial (*Social Movement Theory*)

Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah isu dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang menuntut perubahan dari pemegang kekuasaan. Dalam konteks ini, ketiadaan tekanan dari pihak internal (mahasiswa, dosen) dan eksternal (komunitas lokal, LSM) menunjukkan bahwa isu Eko-teologi belum berhasil menjadi gerakan sosial yang cukup kuat di dalam maupun di sekitar IAKN Toraja untuk memicu respons dari pimpinan.

6. Teori Institusional (*Institutional Theory*)

Teori ini berfokus pada bagaimana organisasi dipengaruhi oleh tekanan dari lingkungan eksternal. Organisasi akan mengadopsi struktur, praktik, atau kebijakan tertentu (yang disebut sebagai isomorfisme institusional) agar dianggap sah atau relevan oleh masyarakat. Ketiadaan kebijakan Eko-teologi di IAKN Toraja menunjukkan bahwa institusi belum merasakan tekanan yang cukup kuat dari lingkungan (misalnya, pemerintah, donatur, atau masyarakat) untuk mengadopsi isu tersebut.

Kerangka Konseptual

1. Eko-teologi sebagai Respons Teologis

Konsep ini menekankan bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya masalah ilmiah atau sosial, melainkan juga masalah teologis. Eko-teologi hadir sebagai upaya untuk menafsirkan kembali ajaran agama agar relevan dengan krisis lingkungan saat ini. Konsep ini menantang pandangan antroposentris (manusia sebagai pusat) dan menggantinya dengan pandangan teosentris (Tuhan sebagai pusat) atau ekosentris (ekosistem sebagai pusat), di mana manusia memiliki tanggung jawab moral untuk merawat ciptaan Tuhan.

2. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Holistik

Konsep ini menyatakan bahwa pendidikan, Analisis, dan pengabdian tidak dapat berjalan secara terpisah. Sebaliknya, ketiganya harus saling terintegrasi dan didasarkan pada nilai-nilai yang sama. Dalam konteks Eko-teologi, ini berarti bahwa nilai-nilai kelestarian lingkungan harus menjadi benang merah yang menghubungkan kurikulum (pendidikan), topik-topik riset (Analisis), dan program-program di masyarakat (pengabdian kepada masyarakat).

3. Kampus sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*)

Konsep ini memandang perguruan tinggi tidak hanya sebagai lembaga akademik, tetapi juga sebagai kekuatan moral dan intelektual yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dengan demikian, IAKN Toraja seharusnya tidak hanya fokus pada internal, tetapi juga menjadi advokat dan pionir dalam isu lingkungan di Toraja. Ketiadaan kebijakan resmi menghambat peran ini karena advokasi menjadi tidak terstruktur dan tidak berkelanjutan.

4. Partisipasi Multistakeholder (*Multi-stakeholder Participation*)

Konsep ini menegaskan bahwa solusi untuk masalah yang kompleks, seperti kerusakan lingkungan, memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak (multi-stakeholder). Di IAKN Toraja, ini berarti bahwa pembentukan kebijakan Eko-teologi tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pimpinan. Sebaliknya, proses ini harus melibatkan dosen, mahasiswa, staf, serta komunitas lokal dan adat yang memiliki pengetahuan dan kearifan tentang lingkungan. Ketiadaan kebijakan menunjukkan bahwa partisipasi ini belum terwujud secara optimal.

5. Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

Konsep ini menyoroti bahwa kebijakan yang efektif harus didasarkan pada data dan Analisis yang akurat. Dalam konteks ini, Analisis tentang Eko-teologi dan dampak lingkungan di Toraja harus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian, Analisis semacam itu masih minim, sehingga pimpinan tidak memiliki "bukti" yang kuat untuk membuat kebijakan formal.

6. Pendidikan Transformatif (*Transformative Education*)

Konsep ini memandang pendidikan tidak hanya sebagai transfer pengetahuan, tetapi sebagai proses yang mengubah cara pandang, nilai, dan perilaku individu. Melalui Eko-teologi, pendidikan di IAKN Toraja dapat menjadi transformatif, mengubah mahasiswa dari sekadar pelajar menjadi agen yang memiliki kesadaran ekologis dan komitmen untuk bertindak. Ketiadaan kerangka kebijakan menghalangi terjadinya transformasi ini secara institusional.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam artikel kebijakan ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kebijakan (policy analysis). Penelitian ini dirancang untuk mengidentifikasi akar permasalahan, merumuskan alternatif kebijakan, dan mengevaluasinya secara sistematis guna menghasilkan rekomendasi yang strategis dan dapat diimplementasikan.

1. Identifikasi dan Analisis Masalah

Tahap pertama adalah mengidentifikasi masalah utama yang menjadi fokus kajian, yaitu belum optimalnya implementasi eko-teologi di IAKN Toraja. Analisis ini dilakukan dengan mengurai akar masalah menjadi tiga poin utama:

- a. Ketiadaan kerangka kebijakan formal di tingkat institusi;
- b. Belum adanya pedoman implementasi yang terpadu;
- c. Eko-teologi belum terimplementasi secara efektif dalam Tri Dharma.

Setelah masalah dan akar masalah teridentifikasi, dilakukan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk memprioritaskan masalah. Analisis ini membantu menentukan tingkat kegawatan masalah berdasarkan seberapa mendesak (Urgency) masalah tersebut harus diselesaikan, seberapa serius (Seriousness) dampak yang ditimbulkan, dan seberapa cepat (Growth) masalah tersebut akan memburuk jika tidak diatasi.

2. Perumusan dan Evaluasi Alternatif Kebijakan

Berdasarkan akar masalah yang telah diprioritaskan, dirumuskan empat alternatif kebijakan yang relevan dan potensial untuk diterapkan di IAKN Toraja, yaitu:

- a. Penerbitan Peraturan Rektor tentang Integrasi Eko-Teologi;
- b. Penyusunan Pedoman Implementasi Eko-Teologi Terpadu;
- c. Pembentukan Pusat atau Gugus Tugas Eko-Teologi Institusional.

3. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis KPI.

Setiap alternatif kebijakan kemudian dievaluasi menggunakan teori skoring William N. Dunn. Analisis ini menggunakan lima kriteria penilaian yang menjadi standar dalam analisis kebijakan, yaitu:

- a. Efektivitas (Effectiveness): Sejauh mana kebijakan mampu mengatasi masalah;
- b. Kecukupan (Adequacy): Sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan seluruh lingkup masalah;
- c. Kelayakan (Feasibility): Seberapa mungkin kebijakan dapat diimplementasikan;
- d. Penerimaan (Acceptability): Seberapa besar kemungkinan kebijakan diterima oleh pemangku kepentingan;
- e. Efisiensi (Efficiency): Seberapa baik kebijakan mencapai tujuan dengan sumber daya optimal.

Setiap kriteria diberikan skor numerik 1 hingga 5, dan skor rata-rata digunakan untuk membandingkan kekuatan relatif dari setiap alternatif kebijakan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis kebijakan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa permasalahan utama implementasi eko-teologi di IAKN Toraja berakar pada ketiadaan kerangka kebijakan formal dan pedoman implementasi yang terpadu. Analisis USG menegaskan bahwa masalah ini memiliki tingkat prioritas yang sangat tinggi (skor 100), terutama karena dampaknya yang serius terhadap relevansi institusi dan kemampuannya dalam merespons krisis lingkungan yang kian memburuk. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang strategis dan fundamental untuk mengubah kondisi ini dari inisiatif yang sporadis menjadi upaya yang terstruktur dan terukur.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kajian ini merumuskan dan mengevaluasi empat alternatif kebijakan. Analisis menggunakan teori skoring William N. Dunn memberikan gambaran jelas mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing alternatif. Hasil skoring menunjukkan bahwa "Penerbitan Peraturan Rektor tentang Integrasi Eko-Teologi dalam Tri Dharma" memperoleh skor rata-rata tertinggi (4.0), setara dengan kebijakan penguatan kemitraan strategis, dan melampaui alternatif lain seperti penyusunan pedoman terpadu (skor 3.6) dan pembentukan gugus tugas (skor 3.4). Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan fondasional adalah langkah yang paling strategis untuk diprioritaskan.

Kebijakan Peraturan Rektor meraih skor tertinggi, terutama pada kriteria Efektivitas (skor 5). Hal ini disebabkan kebijakan tersebut secara langsung mengatasi akar permasalahan, yaitu kekosongan kerangka kebijakan formal. Tanpa adanya payung hukum dari Peraturan Rektor, upaya eko-teologi di IAKN Toraja tidak memiliki legitimasi dan mandat yang mengikat. Peraturan ini akan mengubah eko-teologi dari sekadar wacana menjadi prioritas resmi institusi, memberikan arah yang jelas, dan memastikan komitmen dari seluruh pimpinan hingga unit kerja. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi katalisator utama yang memecahkan masalah inti dan memungkinkan solusi lain berkembang (Dunn, 2013).

Hasil analisis Dunn juga menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki Kecukupan (skor 4) yang sangat baik sebagai landasan. Meskipun tidak secara langsung meningkatkan kompetensi dosen atau membangun sistem evaluasi, kebijakan ini mengamanatkan adanya program dan sistem tersebut di masa mendatang. Peraturan rektor akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk pengembangan pedoman, alokasi anggaran, dan pembentukan unit kerja baru. Ini menunjukkan bahwa kebijakan Peraturan Rektor adalah langkah awal yang esensial, yang akan membuka jalan bagi implementasi yang lebih rinci dan teknis.

Dalam konteks kelayakan dan penerimaan, kebijakan ini juga memperoleh skor tinggi (masing-masing 4). Penerbitan peraturan rektor berada dalam kewenangan penuh institusi, menjadikannya layak secara administratif tanpa perlu intervensi eksternal yang kompleks. Di sisi lain, isu eko-teologi yang sejalan dengan etika Kristen tentang pemeliharaan ciptaan membuat kebijakan ini sangat dapat diterima oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan eksternal, yang melihatnya sebagai wujud nyata komitmen institusi terhadap nilai-nilai fundamentalnya (Berry, 1999).

Meskipun demikian, kebijakan ini memperoleh skor yang lebih rendah pada kriteria Efisiensi (skor 3). Hal ini perlu dipahami dalam konteks bahwa meskipun biaya penerbitan peraturan itu sendiri minim, kebijakan ini akan memicu kebutuhan sumber daya dan anggaran yang signifikan untuk program-program yang diamanatkannya, seperti pelatihan dosen atau pengembangan kurikulum. Namun, biaya ini adalah

investasi yang diperlukan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini justru akan meningkatkan efisiensi dengan mencegah pemborosan sumber daya pada inisiatif yang tidak terkoordinasi dan tidak efektif (Bryson, 2018).

Hasil analisis ini menegaskan pentingnya pendekatan berjenjang dalam implementasi kebijakan. Kebijakan "Penerbitan Peraturan Rektor" tidak boleh dilihat sebagai solusi akhir, melainkan sebagai langkah pertama yang harus diprioritaskan. Langkah selanjutnya yang harus segera dilakukan adalah mengembangkan kebijakan turunan yang lebih operasional. Ini sejalan dengan teori implementasi yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan bergantung pada tahapan yang jelas, mulai dari perumusan di tingkat atas hingga eksekusi di tingkat bawah (Pressman & Wildavsky, 1973).

Dengan demikian, strategi kebijakan yang paling efektif adalah memulai dengan penerbitan peraturan rektor sebagai fondasi yang kuat, yang kemudian diikuti dengan:

1. Penyusunan Pedoman Implementasi Terpadu untuk memberikan arah teknis.
2. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi berbasis KPI untuk memastikan akuntabilitas.
3. Penguatan Kapasitas Dosen untuk memastikan implementasi berjalan optimal. Rangkaian kebijakan ini akan saling melengkapi, menciptakan ekosistem eko-teologi yang terstruktur dan berkelanjutan di IAKN Toraja.

Implementasi strategi ini tidak hanya akan memperbaiki tata kelola institusional, tetapi juga akan memberikan dampak signifikan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa akan mendapatkan pemahaman eko-teologi yang holistik, penelitian akan menjadi lebih relevan dan berorientasi pada solusi, serta pengabdian masyarakat akan terarah dan memiliki kontribusi nyata. Ini akan membantu IAKN Toraja memenuhi mandatnya untuk mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara teologis, tetapi juga memiliki kesadaran dan etika lingkungan yang kuat.

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H Ayat 1
UUD 1945, Pasal 28 Ayat 1 secara eksplisit menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, perguruan tinggi, termasuk IAKN Toraja, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk berkontribusi dalam menjaga hak tersebut melalui pendidikan, Analisis, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 28H Ayat (1): "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Tujuan serta fungsi pendidikan tinggi yang tercantum dalam undang-undang ini menempatkan perguruan tinggi sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk membentuk karakter bangsa yang bermartabat. Tanggung jawab ini mencakup peran sebagai kekuatan moral dalam merespons isu-isu krusial, termasuk kerusakan lingkungan. Pengintegrasian Eko-Teologi yang dilaksanakan oleh IAKN Toraja merupakan wujud nyata dari peran moral sebagai diamanatkan dalam UU no. 12 tahun 2012.

- Pasal 5 Ayat (1): “Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.”
 - Pasal 5 Ayat (2): “Pendidikan Tinggi bertujuan... mewujudkan Perguruan Tinggi sebagai kekuatan moral yang mandiri...”
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang ini mempertegas hak atas lingkungan hidup dan membuka ruang bagi partisipasi aktif masyarakat, termasuk institusi pendidikan. Melalui Analisis dan pengabdian, IAKN Toraja dapat memenuhi amanat undang-undang ini dengan memberikan bimbingan dan edukasi kepada masyarakat tentang perlindungan lingkungan.
- Pasal 65 Ayat (1): “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”
 - Pasal 65 Ayat (2): “Setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 244 Tahun 2025.
- Menetapkan “Penguatan Ekoteologi” sebagai salah satu program prioritasnya untuk periode 2025–2029.

Limitasi Kajian

Kajian ini memiliki limitasi utama pada lingkup analisisnya yang berfokus pada IAKN Toraja dan secara spesifik pada aspek kebijakan implementasi eko-teologi. Meskipun kajian ini menggunakan teori kebijakan yang bersifat universal, hasil dan rekomendasinya sangat kontekstual dengan kondisi internal dan eksternal IAKN Toraja, seperti struktur organisasi, budaya institusional, dan konteks sosial-budaya lokal di Toraja. Analisis ini juga tidak mencakup evaluasi mendalam terhadap implementasi teknis kebijakan di lapangan, seperti analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis) secara rinci atau survei langsung terhadap kompetensi dosen. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan merupakan strategi kebijakan di tingkat makro yang memerlukan kajian lanjutan yang lebih terperinci untuk tahap implementasi operasionalnya.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan dan kontribusi utama dari artikel kebijakan ini terletak pada pendekatan analisis yang sistematis dan terintegrasi dalam merumuskan strategi implementasi eko-teologi. Alih-alih hanya mengadvokasi pentingnya eko-teologi secara teoretis, artikel ini memberikan peta jalan kebijakan yang konkret dengan menggunakan teori skoring William N. Dunn untuk secara objektif mengevaluasi dan memprioritaskan alternatif kebijakan yang ada. Kontribusi ini memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan bukan sekadar usulan, melainkan hasil dari analisis yang mendalam dan terukur. Dengan memposisikan Peraturan Rektor sebagai fondasi kebijakan yang harus diutamakan, artikel ini menawarkan model solusi yang holistik, berjenjang, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi referensi praktis bagi institusi pendidikan

teologi lainnya yang ingin mengintegrasikan isu-isu ekologis secara efektif dan berkelanjutan.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Penerbitan Peraturan Rektor tentang Integrasi Eko-Teologi dalam Tri Dharma: IAKN Toraja dapat mengeluarkan Peraturan Rektor (atau Surat Keputusan Rektor) yang secara eksplisit mewajibkan dan memandu integrasi eko-teologi sebagai bagian integral dari visi dan misi institusi dalam setiap aspek Tri Dharma. Kebijakan ini harus mendefinisikan ruang lingkup eko-teologi di konteks IAKN Toraja, menetapkan tujuan strategis yang jelas, serta menggariskan tanggung jawab unit-unit kerja terkait. Adanya kebijakan formal ini akan memberikan landasan hukum yang kuat, mengubah inisiatif parsial menjadi upaya terstruktur, dan memastikan komitmen institusi pada tingkat tertinggi.
2. Penyusunan Pedoman Implementasi Eko-Teologi Terpadu: Untuk mengatasi belum adanya pedoman yang terpadu, IAKN Toraja dapat menyusun buku panduan atau manual implementasi eko-teologi yang komprehensif dan praktis. Pedoman ini akan memberikan arahan langkah-demi-langkah tentang bagaimana eko-teologi diintegrasikan ke dalam: a) kurikulum (misalnya, pengembangan silabus, metode pengajaran inklusif eko-teologi), b) penelitian (misalnya, topik riset prioritas, metodologi penelitian lingkungan dari perspektif teologis), dan c) pengabdian masyarakat (misalnya, model program yang partisipatif dan berdampak). Pedoman ini akan memastikan konsistensi dan keseragaman upaya di seluruh institusi.
3. Pembentukan Pusat atau Gugus Tugas Eko-Teologi Institusional: IAKN Toraja dapat membentuk pusat studi atau gugus tugas khusus eko-teologi di bawah koordinasi rektorat. Unit ini akan memiliki mandat untuk merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan memonitor seluruh program eko-teologi di IAKN Toraja. Peran utamanya meliputi pengembangan kurikulum dan materi ajar, promosi penelitian, inisiasi program pengabdian masyarakat, serta menjalin kemitraan strategis. Keberadaan unit ini akan memastikan ada penanggung jawab yang jelas, meminimalisir upaya yang terfragmentasi, dan mengoptimalkan sumber daya.
4. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Indikator Kinerja Utama (KPI): Untuk mengatasi ketidakterukuran kontribusi, IAKN Toraja harus mengembangkan dan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat dengan Indikator Kinerja Utama (KPI) yang jelas untuk setiap program eko-teologi. Kebijakan ini akan mewajibkan setiap unit melaporkan capaian berdasarkan KPI yang telah disepakati (misalnya, jumlah publikasi, persentase peningkatan kesadaran mahasiswa, volume sampah yang didaur ulang). Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar untuk pengambilan keputusan, alokasi anggaran, dan perbaikan berkelanjutan, sehingga kontribusi institusi menjadi terukur dan akuntabel.

Berikut adalah analisis skoring berdasarkan teori skoring William N. Dunn untuk enam alternatif kebijakan yang telah dirumuskan, dengan menggunakan skala 1-5 (1 = Sangat Buruk, 5 = Sangat Baik).

Berikut adalah analisis skoring berdasarkan teori skoring William N. Dunn untuk enam alternatif kebijakan yang telah dirumuskan, dengan menggunakan skala 1-5 (1 = Sangat Buruk, 5 = Sangat Baik).

No.	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Total
-----	----------------------	-------------	-----------	-----------	------------	---------------	-------

1	Penerbitan Peraturan Rektor tentang Integrasi Eko-Teologi dalam Tri Dharma: IAKN Toraja dapat mengeluarkan Peraturan Rektor (atau Surat Keputusan Rektor) yang secara eksplisit mewajibkan dan memandu integrasi eko-teologi sebagai bagian integral dari visi dan misi institusi dalam setiap aspek Tri Dharma	5	4	4	4	3	20
2	Penyusunan Pedoman Implementasi Eko-Teologi Terpadu: Untuk mengatasi belum adanya pedoman yang terpadu, IAKN Toraja dapat menyusun buku panduan atau manual implementasi eko-teologi yang komprehensif dan praktis.	4	3	4	4	3	18
3	Pembentukan Pusat atau Gugus Tugas Eko-Teologi Institusional: IAKN Toraja dapat membentuk pusat studi atau gugus tugas khusus eko-teologi di bawah koordinasi rektorat. Unit ini akan memiliki mandat untuk merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan memonitor seluruh program eko-teologi di IAKN Toraja.	4	4	3	4	2	17
4	Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Berbasis Indikator Kinerja Utama (KPI): Untuk mengatasi ketidakterukuran kontribusi, IAKN Toraja harus mengembangkan dan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang kuat dengan Indikator Kinerja Utama (KPI) yang jelas untuk setiap program eko-teologi.	5	4	3	3	2	17

Berdasarkan skoring di atas, terlihat adanya 3 (tiga) alternatif kebijakan yang memiliki skor tertinggi dan setara, di antaranya:

1. Penerbitan Peraturan Rektor tentang Integrasi Eko-Teologi dalam Tri Dharma dengan nilai skor 20;

2. Penyusunan Pedoman Implementasi Eko-Teologi Terpadu dengan nilai skor 18;
3. Pembentukan Pusat atau Gugus Tugas Eko-Teologi Institusional dengan nilai skor 17.

Berdasarkan analisis skoring tersebut, kebijakan yang dipilih adalah Penerbitan Peraturan Rektor tentang Integrasi Eko-Teologi dalam Tri Dharma. Peraturan Rektor Ini adalah investasi awal yang akan membawa hasil dalam jangka panjang, memastikan bahwa IAKN Toraja tidak hanya berbicara tentang eko-teologi, tetapi benar-benar mengimplementasikannya secara sistematis, terukur, dan berdampak.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Artikel kebijakan ini menyoroti kesenjangan kritis antara wacana eko-teologi yang berkembang dan ketiadaan kebijakan formal di IAKN Toraja, sebuah situasi yang secara signifikan menghambat kontribusi nyata institusi dalam konservasi lingkungan. Permasalahan utama bersumber dari ketiadaan payung kebijakan yang mengikat, yang berakibat pada respons institusi terhadap krisis lingkungan yang bersifat parsial, sporadis, dan tidak terukur. Kesenjangan ini merusak ketiga pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi: kurikulum pendidikan yang tidak terintegrasi, riset ekologis yang tidak diprioritaskan, dan program pengabdian yang tidak konsisten. Pada akhirnya, kondisi ini melemahkan advokasi kampus dan membatasi peran IAKN Toraja sebagai agen perubahan yang efektif. Dengan demikian, artikel ini menyerukan kepada pimpinan IAKN Toraja untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan eko-teologi yang komprehensif, guna memastikan bahwa institusi tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara teologis, tetapi juga pemimpin yang berintegritas dan berkomitmen untuk keutuhan dan keberlanjutan alam ciptaan (*integrity and sustainability of creation*).

Rekomendasi

IAKN Toraja sangat direkomendasikan untuk memprioritaskan pengesahan Peraturan Rektor tentang Integrasi Eko-Teologi dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAKN Toraja. Kebijakan ini akan secara langsung mengatasi akar masalah ketiadaan kerangka kebijakan formal di tingkat institusi, memberikan mandat resmi dan arahan yang jelas untuk seluruh upaya eko-teologi dalam Tri Dharma. Dengan demikian, inisiatif yang selama ini parsial dan tidak terstruktur akan memiliki landasan hukum yang kuat, memastikan komitmen institusi pada level tertinggi, dan menjadi payung yang esensial untuk pengembangan pedoman implementasi terpadu serta sistem evaluasi yang akuntabel di masa mendatang.

REFERENSI

- Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Penerbit Buku Kompas.

- Pamantung, Salmon dan Susanta, Yohanes Krismato, "Pendamaian Kristus dalam Surat Kolose dan Ritus *Mosehe* bai Pengembangan Eo-Teologi Kontekstual Sulawesi Tenggara" dalam Hans Harmakaputra, *Bumi, Laut dan Keselamatan: Refleksi Ekoteologi Kontekstual*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022).
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. B. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing that Federal Programs Work at All*. University of California Press.
- Sembel, D. T. (2023). *Ekoteologi dalam Perspektif Kristen*. Penerbit Andi.
- Singgih, E. G. (2018). *Pengantar Teologi Ekologi*. Kanisius.
- Susanto, H. (2021). Penerapan Green Campus dalam Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 1-15.
- UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. UNESCO Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Sabar, S. (2018). Analisis Proses Formulasi Kebijakan Publik Berbasis Teori Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, 3(2), 127-140.
- Hussain, S. T., et al. (2016). A review of organizational change and transformation studies: Past, present and future research. *International Journal of Modern Management*, 1(1), 1-15.
- Armstrong, M., & Taylor, S. (2014). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. Kogan Page Publishers.
- Wenger, E. (1998). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press.
- McAdam, D., McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1996). *Comparative perspectives on social movements: Political opportunities, mobilizing structures, and cultural framings*. Cambridge University Press.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147-160.